

PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Amerta Felina Kusuma

Amertafelina@gmail.com

Titik Mildawati

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to examine the effect of accountability, transparency, and internal controlling on the performance of Local Government Agencies. While, the research was held at Surabaya Local Government Agencies. This research was quantitative. Moreover, the data were primary with questionnaires as the instrument. Furthermore, the data collection technique used purposive sampling. In line with, there were 100 respondents. Additionally, the data analysis used multiple linear regression with SPSS 25. The research result concluded that accountability had a positive effect on the performance of Local Government Agencies. This meant, thought accountability, the public could know the event's implementations. Therefore, they were encouraged to improved their performance as well as possible. Likewise, transparency had a positive effects on the performance of Local Government Agencies. It meant transparency could give access through the public in order to find out the government's performance in doing their works. Similarly, internal controlling had a positive effect on the performance of Local Government Agencies. This was caused as internal controlling could inform organization objectives which had been decided and assess its performance.

Keywords: accountability, transparency, internal controlling, government performance

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan pengendalian internal terhadap kinerja instansi pemerintah. Penelitian ini dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Surabaya. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer melalui penyebaran kuesioner. Sampel diambil dengan menggunakan metode purposive sampling dan diperoleh sebanyak 100 responden. Data dianalisis menggunakan metode analisis regresi linier berganda yang diolah menggunakan program SPSS 25. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah. Hal ini dikarenakan adanya akuntabilitas, masyarakat dapat mengetahui pelaksanaan kegiatan yang dilakukan sehingga berusaha untuk meningkatkan kinerja sebaik mungkin. Transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah. Hal ini dikarenakan transparansi dapat memberikan akses bagi masyarakat untuk mengetahui kinerja pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah. Hal ini dikarenakan pengendalian internal dapat memberikan informasi dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan dan mengukur kinerja yang dilaksanakan.

Kata Kunci: akuntabilitas, transparansi, sistem pengendalian internal, kinerja pemerintah

PENDAHULUAN

Akuntansi sektor publik merupakan sistem akuntansi yang digunakan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban terhadap publik oleh lembaga-lembaga publik. Transparansi, akuntabilitas, dan pengendalian internal sangat penting untuk dilakukan dalam mengelola anggaran karena hasil akhir dari pengelolaan tersebut harus diberikan dan dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik. Pemerintah harus bisa menyediakan *public goods and services* dalam memenuhi hak setiap warga negara untuk bisa menikmatinya, sebagai imbalan tidak langsung atas kewajiban membayar pajak yang telah mereka lakukan.

Organisasi sektor publik bertanggungjawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjunjung tinggi keinginan rakyat, melaksanakan pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan sosial, menjalankan aspek-aspek fungsional dari pemerintahan secara efisien dan efektif yang bertujuan untuk mewujudkan *good governance* (Mahsun, 2006). Penerapan *good governance* di Indonesia sendiri dinilai masih belum berperan dalam meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Hal tersebut disinyalir karena pada implementasi dan pengembangan pengukuran kinerja masih sebatas paksaan karena adanya regulasi yang mengatur (Sihaloho dan Halim, 2005).

Akuntabilitas merupakan konsep terkait dengan mekanisme pertanggungjawaban dari satu pihak ke pihak yang lain. Jitmau, (2017) menyatakan bahwa Kinerja instansi pemerintah itu berkaitan erat dengan akuntabilitas. Saat ini perkembangan akuntabilitas di Indonesia dan sistem akuntansi keuangan daerah belumlah sebagaimana diharapkan. Permasalahan yang ada disekitar akuntabilitas dan sistem akuntansi keuangan daerah, tidak saja dalam tataran peraturan perundangan yang mengaturnya, namun juga dari mekanisme, metode dan informasi yang perlu diungkapkan dalam laporan akuntabilitas (Pamungkas, 2012). Undang-undang yang mengatur tentang akuntabilitas sektor publik, telah mengalami perubahan mendasar dengan penekanan pada peranan sistem akuntansi dalam pengukuran dan pengevaluasian baik kinerja keuangan maupun pelayanan, mendorong pengungkapan dan pengkomunikasian hasil-hasil kepada stakeholders.

Aspek lain yang mempengaruhi kinerja suatu pemerintah daerah adalah transparansi. Transparansi memiliki arti bahwa seluruh penyelenggaraan pemerintah harus terbuka kepada masyarakat umum, baik dalam hal pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan serta berhubungan dengan suatu keputusan perlu memegang akses untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Transparansi dapat ditinjau dari tiga aspek, yaitu kebijakan terbuka terhadap pengawasan, akses informasi sehingga masyarakat sebagai prinsipal bisa menjangkau tiap segi kebijakan pemerintah sebagai agen, dan berlakunya prinsip check and balance antara lembaga eksekutif dan legislatif. Kurniawan (2013) mengemukakan, bahwa transparansi terwujud apabila pemerintah bersedia untuk menginformasikan kepada masyarakat/DPRD bagaimana dana publik digunakan/dikelola dalam kegiatan dan program pemerintah. Transparansi dalam sistem pengelolaan dana pemerintah desa dimaksudkan sebagai upaya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan terbuka. Prinsip transparansi menjamin setiap orang agar memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah yang dapat dijangkau publik.

Menurut Indriasari (2008), pemerintah daerah berkewajiban mempublikasikan informasi laporan keuangan agar dapat digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Seiring dengan tuntutan transparansi dan akuntabilitas atas pelaksanaan otonomi daerah dalam hal pengelolaan keuangan daerah, instansi pemerintahan diwajibkan melakukan pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan keuangannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang didasarkan pada perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan upaya reformasi dan pengembangan, khususnya di bidang akuntansi pemerintahan, yang berkesinambungan sehingga terbentuk sistem yang tepat. Sistem pengendalian internal memiliki beberapa elemen yang sangat penting dalam pengelolaan suatu akuntabilitas daerah, elemen-elemen tersebut adalah lingkungan pengendalian, resiko pengendalian, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi. Kendala informasi akuntansi dan laporan keuangan adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang relevan dan andal akibat keterbatasan (*limitations*) atau karena alasan-alasan praktis.

Kinerja instansi pemerintah berkaitan erat dengan akuntabilitas dan transparansi. Penerapan berbagai aturan perundang-undangan yang ada terkait dengan penerapan konsep akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan diharapkan dapat

mewujudkan pengelolaan pemerintah daerah yang baik dan berpihak kepada rakyat. Implementasi akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Pengawasan kinerja tidak bisa hanya ditentukan dalam tenggang waktu yang singkat, atau dalam pengawasannya hanya disimpulkan kinerja pada satu periode saja. Namun harus berkala dan berkelanjutan agar mengetahui apakah kinerja yang diukur mengalami progres atau bahkan bisa jadi mengalami penurunan (Riswanto, 2016).

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka dapat diidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut: (1) Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah?, (2) Apakah transparansi berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah?, (3) Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah?. Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dalam penelitian ini adalah: (1) Untuk menguji pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah pada SKPD Kota Surabaya, (2) Untuk menguji pengaruh transparansi terhadap kinerja pemerintah pada SKPD Kota Surabaya, (3) Untuk menguji pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kinerja pemerintah pada SKPD Kota Surabaya.

TINJAUAN TEORITIS

Teori Keagenan

Teori keagenan muncul akibat adanya perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen sehingga timbul suatu konflik. Konflik kepentingan antara prinsipal dan agen terjadi berdasarkan asumsi bahwa masing-masing individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri. Hubungan masyarakat dengan pemerintah dapat dikatakan sebagai hubungan keagenan karena adanya kontrak yang ditetapkan oleh masyarakat (prinsipal) yang menggunakan pemerintah (agen) untuk menyediakan jasa yang menjadi kepentingan masyarakat (Jensen dan Meckling, 1976). Hubungan antara pemerintah dan masyarakat merupakan hubungan sebuah pertanggungjawaban, dalam hal ini pemerintah sebagai agen harus mempertanggungjawabkan aktivitasnya kepada masyarakat yang telah memberi dana (*public fund*).

Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principle*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung-jawaban tersebut (Mardiasmo, 2009). Menurut Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (2003) akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Transparansi

Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan pada preferensi publik. Krina (2003) menjelaskan bahwa Prinsip transparansi paling tidak dapat diukur melalui sejumlah indikator seperti: (1) Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik, (2) Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik, (3) Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun

penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani.

Sistem Pengendalian Internal

Menurut Sawyer (2009) Internal audit adalah suatu fungsi penilaian independen yang dibentuk dalam suatu organisasi untuk mengkaji dan mengevaluasi aktivitas organisasi sebagai bentuk jasa yang diberikan bagi organisasi. Dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Kinerja Instansi Pemerintah

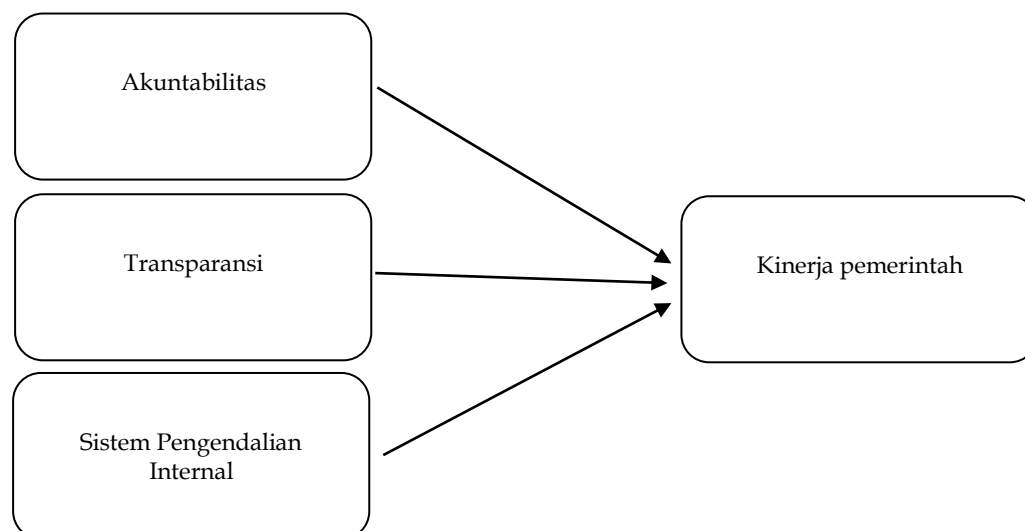
Kinerja Instansi Pemerintah adalah “gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan” (MenPAN, 2007). Banyak pendapat para ahli terkait dengan kinerja pemerintah daerah, baik dari sisi definisi, pengukuran, indikator, dan evaluasi kinerja. Setelah suatu sistem pengelolaan keuangan terbentuk, perlu disiapkan suatu alat untuk mengukur kinerja dan mengendalikan pemerintahan agar tidak terjadi KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), tidak adanya kepastian hukum dan stabilitas politik, dan ketidakjelasan arah dan kebijakan pembangunan.

Penelitian Terdahulu

Pertama, penelitian menurut Karim dan Mursalim (2019), melakukan penelitian tentang pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan pengendalian internal terhadap kinerja keuangan. Hasil menunjukkan semua variabel bebasnya berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Menurut Damayanti (2017), melakukan penelitian tentang pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan pengendalian internal terhadap kinerja instansi pemerintah. Hasil menunjukkan bahwa semua bebas berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah. Menurut Wiguna *et al.*, (2015), melakukan penelitian tentang pengaruh pengawasan keuangan daerah, transparansi, akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah daerah. Hasil menunjukkan Pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Menurut Auditya (2013), melakukan penelitian tentang pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah daerah. Hasil menunjukkan akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Menurut Saputra *et al.*, (2014), melakukan penelitian tentang pengaruh transparansi, akuntabilitas dan komitmen organisasi terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah. Hasil menunjukkan semua variabel bebas berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

Rerangka Konseptual

Penelitian ini menggunakan variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen meliputi kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, kualitas sumber daya manusia, dan sistem pelaporan. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Rerangka konseptual dalam penelitian ini dapat dijelaskan pada Gambar 1 di bawah ini:



Gambar 1
Rerangka Konseptual

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah

Penerapan akuntabilitas diharapkan dapat menghindari adanya penyalahgunaan atau penyelewengan dalam proses pengelolaan anggaran. Para pegawai akan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya jika penyusunan anggaran dilakukan secara jelas. Penelitian yang dilakukan oleh Auditya (2013), Damayanti (2017), Wiguna *et al.*, (2015) dengan hasil menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pemerintah. Semakin baik bentuk pertanggungjawaban yang diberikan pemerintah Kinerja Pemerintah Pengendalian Internal Transparansi Akuntabilitas 19 kepada masyarakat, maka semakin baik pula pemerintah dalam meningkatkan kinerjanya. Dengan kata lain, akuntabilitas mempengaruhi kinerja pemerintah dalam proses pelaksanaannya. Akuntabilitas merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Pengaruh kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pengaruh Transparansi Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah

Transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Berdasarkan penjelasan diatas sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Auditya (2013), Saputra *et al.*, (2014), Wiguna *et al.*, (2015) dengan hasil menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Semakin mudah masyarakat dalam memperoleh informasi tentang program penyelenggaraan pemerintah, maka praktik penyelenggaraan pemerintah tersebut dapat dinilai memiliki transparansi yang tinggi. Transparansi pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah daerah kepada publik merupakan bentuk keberhasilan pemerintah dalam mengelola dana yang ada untuk kepentingan masyarakat. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Pengaruh transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja instansi pemerintah.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah

Sistem pengendalian intern pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan

dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penelitian yang berkaitan dengan pengendalian internal yaitu meneliti pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan sistem pengendalian internal terhadap kinerja pada pegawai pendapatan Kota Gorontalo (Karim dan Mursalim, 2019; Damayanti, 2017). Hasil penelitiannya menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan pada pendapatan Kota Gorontalo. Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Pengaruh sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kinerja instansi pemerintah.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Obyek) Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dimana penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian yang menganalisis data dengan bentuk angka yang dipusatkan pada pengujian hipotesis. Penelitian ini merupakan penelitian kasual komparatif. Penelitian kasual komparatif merupakan tipe penelitian dengan karakteristik masalah berupa sebab akibat antara dua variabel atau lebih serta menunjukkan arah pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai SKPD Kota Surabaya.

Teknik Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel atas responden dilakukan secara *purposive sampling*. Purposive sampling yaitu cara penentuan sampel dengan cara pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel (Sugiyono, 2012). Roscoe (1975) Sampel dapat dipilih dengan kriteria tertentu sampel dapat mendukung dalam penelitian ini. Kriteria yang ditentukan dalam penelitian ini adalah : (1) ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai dengan 500; (2) Bila sampel dibagi dalam kategori maka jumlah anggota sampel tiap kategori minimal 30; (3) untuk penelitian eksperimen sederhana, maka jumlah anggota sampel masing-masing antara 10 s/d 24 20. Variabel yang terdapat dalam penelitian ini adalah 3 (tiga) variabel independen dan 1 satu variabel dependen. Maka jumlah sampel minimal yang harus diambil dalam penelitian ini adalah $4 \times 20 = 80$. Sehingga dari kriteria yang telah ditetapkan tersebut peneliti mengambil 20 SKPD Kota Surabaya, dimana setiap SKPD diberikan 6 kuisisioner. Sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 120 responden. Responden tersebut merupakan pegawai SKPD pada dinas kota Surabaya yang menjabat sebagai kepala Dinas, pejabat setingkat kepala Sub Bagian Keuangan, setingkat kepala Sub Bidang dan staff.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data primer. Data primer adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan seseorang, bukan penelitian melakukan studi mutakhir (Sekaran, 2006). Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa kuisisioner (angket) yang merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2011). Dan kuisisioner diambil kembali oleh peneliti dengan waktu yang telah dijanjikan responden. Dalam penelitian ini menggunakan sumber kuisisioner dengan skala likert 1-5 yaitu Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Netral (N), Setuju (S), dan Sangat Setuju (SS) (Sopannah dan Isa, 2010; Aristanti, 2011; Sumarno, 2005).

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel independen (bebas) dalam penelitian ini yaitu akuntabilitas, transparansi, dan sistem pengendalian internal. Sedangkan variabel dependen (terikat) dalam penelitian ini yaitu kinerja instansi pemerintah.

Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*). Dalam penelitian ini menggunakan indikator yang diperkenalkan oleh Mardiasmo (2005: 21) menjelaskan ada empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu: 1) Akuntabilitas kejujuran dan Akuntabilitas hukum (*accountability for probity and legality*), 2) Akuntabilitas proses (*process accountability*), 3) Akuntabilitas program (*program accountability*), 4) Akuntabilitas Kebijakan (*policy accountability*).

Transparansi

Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya. Dalam penelitian ini menggunakan indikator dari Krina (2003) yaitu: 1) mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik, 2) mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik, 3) mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani.

Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian intern adalah suatu perencanaan meliputi struktur organisasi dan semua metode yang digunakan dengan tujuan untuk menjaga keamanan, memeriksa kebenaran dan ketelitian data akuntansi, serta membantu mendorong dipatuhinya peraturan yang telah ditetapkan. Dalam penelitian yang sebelumnya telah dilakukan oleh Karim dan Mursalim (2019), menjelaskan bahwa pengendalian internal memiliki berbagai indikator antara lain Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi dan Pemantauan.

Kinerja Pemerintah

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (*strategic planning*) suatu organisasi. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini dikemukakan oleh Dessler (2009) sebagai berikut: 1) Kualitas kerja; 2) Produktivitas; 3) Pengetahuan pekerjaan; 4) Bisa diandalkan; 5) Kehadiran; dan 6) Kemandirian.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu metode atau pendekatan yang digunakan untuk menganalisis data dalam rangka memecahkan masalah maupun pengujian hipotesis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode regresi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda yang digunakan dalam untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan pengendalian internal terhadap kinerja pemerintah daerah.

Statistik Deskriptif

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono (2011) penelitian deskriptif adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang umum. Pengujian ini juga digunakan untuk melihat gambaran keseluruhan dari sampel dan untuk memahami variabel- variabel penelitian agar lebih mudah karena uji statistik deskriptif mencakup nilai rata-rata (mean), nilai minimum, nilai maksimum, dan nilai penyimpangan baku (standar deviasi) dan masing-masing variabel.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Uji validitas dalam penelitian ini akan dilakukan dengan mengkorelasikan masing-masing pernyataan dengan jumlah skor untuk masing-masing variabel. Penghitungan korelasi antar masing-masing pernyataan dengan skor total dilakukan dengan menggunakan rumus teknik korelasi "*product moment*", (Sugiyono; 2003). Secara statistik angka korelasi yang diperoleh harus dibandingkan dengan angka kritis Tabel korelasi nilai r . bila r hitung $>$ r Tabel berarti data tersebut signifikan (valid) dan layak digunakan dalam pengujian hipotesis penelitian. Sebaliknya, bila r hitung $<$ r Tabel berarti data tersebut tidak signifikan (tidak valid) dan tidak diikutsertakan dalam pengujian hipotesis penelitian. Setelah ditentukan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang digunakan adalah valid, kemudian mengadakan uji reliabilitas.

Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk (Ghozali, 2018). Kuesioner dikatakan reliabel atau handal apabila jawaban Seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Reliabilitas diukur dengan uji statistik *Cronbach Alpha*. Suatu variabel atau konstruk dikatakan reliabel apabila memberikan nilai *Cronbach Alpha* $>$ 0,60 (Ghozali, 2018).

Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas

Uji normalitas dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi variabel terikat dan variabel bebas mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk menguji normalitas data dilakukan dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Kemudian untuk menerima atau menolak hipotesis dengan cara membandingkan-value dengan taraf signifikansi sebesar 5%. Dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas ada jika nilai Signifikansi $>$ 0,05 maka data tersebut berdistribusi normal dan jika nilai Signifikansi $<$ 0,05 maka data tersebut berdistribusi tidak normal (Ghozali, 2018).

Uji Multikolinearitas

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika terjadi korelasi, maka terdapat masalah multikolinieritas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independennya. Multikolinieritas yang berbahaya terjadi apabila nilai dari *Variance Inflation Factor* (VIF) lebih besar dari 10 atau nilai tolerance sebesar 0.10 (Gujarati, 2008).

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dan residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas (Ghozali, 2011). Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas salah satunya dengan cara melihat

grafik scatter plot antara SRESID dan ZPRED. Scatter plot sendiri yaitu grafik yang diplot poin untuk titik yang menunjukkan hubungan antara dua pasang data. Apabila terdapat pola tertentu, seperti titik-titik membentuk pola tertentu yang teratur baik melebar, bergelombang, maupun menyempit maka hal tersebut menunjukkan terjadi heteroskedastisitas. Tetapi jika titik-titik menyebar dengan pola titik diatas dan dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y, maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi.

Analisis Regresi Linier Berganda

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu regresi linear berganda yang biasanya digunakan untuk memperhatikan dan meramalkan suatu nilai dalam hubungannya dengan variabel yang lain yang diketahui melalui garis persamaan regresinya, model regresi berganda ini bertujuan untuk mengestimasi rata-rata populasi dan nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui besarnya (Ghozali, 2016). Persamaan regresi yang digunakan adalah:

$$KP = \alpha + \beta_1AK + \beta_2TR + \beta_3PI + e$$

Keterangan :

KP	: Kinerja Pemerintah
α	: konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien Regresi
AK	: Akuntabilitas
TR	: Transparansi
PI	: Pengendalian Internal
e	: Koefisien Error

Uji Hipotesis

Koefisien Determinasi (R^2)

Uji Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Apabila nilai R^2 mendekati 0 menunjukkan kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen mengalami keterbatasan. Sedangkan nilai R^2 yang memiliki nilai 1 atau mendekati 1 menunjukkan kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2018).

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji Kelayakan Model (Uji F) digunakan untuk menguji apakah terdapat pengaruh signifikan pada model penelitian yang layak untuk diuji (Ghozali, 2018). Adapun kriteria pengujian untuk mengambil keputusan pada uji kelayakan model antara lain adalah: a) Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka model regresi yang dihasilkan tidak baik (tidak layak) maka tidak dapat digunakan untuk analisis selanjutnya. b) Jika nilai signifikan $< 0,05$ maka model regresi yang dihasilkan baik (layak) maka dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

Uji Hipotesis (Uji t)

Uji Hipotesis (Uji t) digunakan untuk menguji seberapa besar pengaruh pada setiap variabel independen yang digunakan secara individual dalam menjelaskan variabel dependen. Adapun kriteria pengujiannya dengan tingkat *level of significant* $\alpha = 5\%$ adalah sebagai berikut: a) Jika nilai signifikan uji t $> 0,05$ maka, H_0 diterima yang berarti bahwa secara individual variabel independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap

variabel dependen; b) Jika nilai signifikan uji $t < 0,05$ maka, H_0 ditolak yang berarti bahwa secara individual variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Tabel 1
Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
AK	100	15	43	31,32	5,264
TR	100	11	37	27,51	4,331
SPI	100	16	42	32,87	5,533
KP	100	15	45	35,62	7,299
Valid N (<i>listwise</i>)	100				

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 1 hasil statistik deskriptif bahwa (1) Nilai mean pada akuntabilitas sebesar 31,32, hal ini mengindikasikan bahwa jawaban responden pada variabel akuntabilitas relatif tinggi. Sedangkan standar deviasinya sebesar 5,264, yakni menjauhi angka 0 sehingga dapat dikatakan bahwa penyebaran data adalah cukup beragam. (2) Nilai mean pada transparansi sebesar 27,51, hal ini mengindikasikan bahwa jawaban responden pada variabel transparansi relatif tinggi. Sedangkan standar deviasinya sebesar 4,331, yakni menjauhi angka 0 sehingga dapat dikatakan bahwa penyebaran data adalah cukup beragam. (3) Nilai mean pada pengendalian internal sebesar 32,87, hal ini mengindikasikan bahwa jawaban responden pada variabel pengendalian internal relatif tinggi. Sedangkan standar deviasinya sebesar 7,299, yakni menjauhi angka 0 sehingga dapat dikatakan bahwa penyebaran data adalah cukup beragam. (4) Nilai mean pada kinerja pemerintah sebesar 35,62, hal ini mengindikasikan bahwa jawaban responden pada variabel kinerja pemerintah relatif tinggi. Sedangkan standar deviasinya sebesar 7,299, yakni menjauhi angka 0 sehingga dapat dikatakan bahwa penyebaran data adalah cukup beragam.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Tabel 2
Hasil Uji Validitas

Variabel	Item Pernyataan	r_{hitung}	$r_{tabel} (\alpha=5\%)$	Keterangan
Akuntabilitas	AK1	0,553	0,1966	Valid
	AK2	0,693	0,1966	Valid
	AK3	0,719	0,1966	Valid
	AK4	0,640	0,1966	Valid
	AK5	0,667	0,1966	Valid
	AK6	0,722	0,1966	Valid
	AK7	0,664	0,1966	Valid
	AK8	0,630	0,1966	Valid
	AK9	0,557	0,1966	Valid
Transparansi	TR1	0,536	0,1966	Valid
	TR2	0,608	0,1966	Valid
	TR3	0,659	0,1966	Valid
	TR4	0,784	0,1966	Valid
	TR5	0,758	0,1966	Valid
	TR6	0,715	0,1966	Valid

	TR7	0,699	0,1966	Valid
	TR8	0,625	0,1966	Valid
Pengendalian Internal	PI1	0,735	0,1966	Valid
	PI2	0,699	0,1966	Valid
	PI3	0,576	0,1966	Valid
	PI4	0,679	0,1966	Valid
	PI5	0,645	0,1966	Valid
	PI6	0,780	0,1966	Valid
	PI7	0,815	0,1966	Valid
	PI8	0,747	0,1966	Valid
	PI9	0,556	0,1966	Valid
Kinerja Pemerintah	KP1	0,804	0,1966	Valid
	KP2	0,872	0,1966	Valid
	KP3	0,855	0,1966	Valid
	KP4	0,834	0,1966	Valid
	KP5	0,865	0,1966	Valid
	KP6	0,828	0,1966	Valid
	KP7	0,780	0,1966	Valid
	KP8	0,787	0,1966	Valid
	KP9	0,818	0,1966	Valid

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 2 nilai r hitung dari semua item pernyataan variabel independen dan variabel dependen memiliki nilai > dari r tabel, sehingga dapat diketahui dan disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel independen dan variabel dependen dalam penelitian ini dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

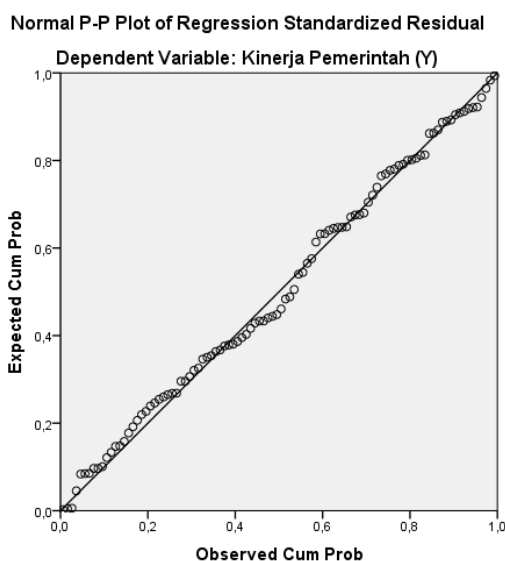
Tabel 3
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's alpha (a)</i>	Keterangan
AK	0,829	Reliabel
TR	0,829	Reliabel
PI	0,866	Reliabel
KP	0,942	Reliabel

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 3 menunjukkan bahwa pengujian reliabilitas dari semua variabel independen dan variabel dependen memiliki nilai *Cronbach's alpha* > 0,60. Maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini dinyatakan reliabel atau layak digunakan untuk mengukur pernyataan atau indikator kuesioner penelitian.

Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas



Gambar 2
Uji Normalitas

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

Berdasarkan pada Gambar 2 dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar disekitar diagonal serta mengikuti arah garis diagonal tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi normalitas. Uji normalitas juga dapat dilakukan menggunakan perhitungan statistik dengan uji statistik non-parametik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

<i>Unstandardized Residual</i>		
N		100
<i>Normal Parameters^{a,b}</i>	<i>Mean</i>	,0000000
	<i>Std. Deviation</i>	,41615347
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	,053
	<i>Positive</i>	,053
	<i>Negative</i>	-,044
<i>Kolmogorov-Smirnov Z</i>		,053
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 4 hasil uji normalitas data dengan menggunakan *Kolmogorov-Smirnov* dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini menunjukkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar $0,200 > 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi layak untuk digunakan.

Uji Multikolinearitas

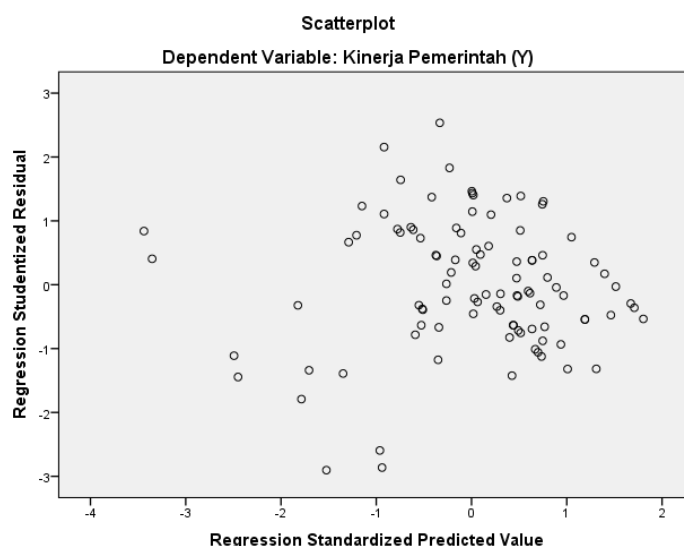
Tabel 5
Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
AK	,550	1,817
TR	,631	1,585
PI	,836	1,196

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 5 dapat diketahui bahwa semua variabel memiliki nilai *tolerance value* > 0,10 dan nilai VIF < 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terdapat adanya multikolinearitas antar variabel independen.

Uji Heteroskedasitas



Gambar 3
Uji Heteroskedasitas
 Sumber: Data primer yang diolah

Berdasarkan Gambar 3 diatas dapat disimpulkan bahwa tidak ada yang membentuk pola, titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi dan layak untuk digunakan dalam penelitian ini.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, kualitas sumber daya manusia, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Surabaya. Data yang diperoleh dari hasil jawaban kuesioner yang telah diisi oleh 100 responden di SKPD Kota Surabaya diolah dengan menggunakan bantuan program SPSS versi 25.0, maka dihasilkan persamaan regresi linear berganda dalam Tabel 7 sebagai berikut:

Tabel 6
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Coefficients ^a				Sig.
	Unstandardized Coefficients		T		
	B	Std. Error			
	(Constant)	-1,462	0,361	-4,051	0,000
1	AK	0,314	0,098	3,205	0,002
	TR	0,311	0,099	3,149	0,002
	PI	0,892	0,076	11,810	0,000

a. Dependent Variable: AKIP

Sumber: Data primer yang diolah, tahun 2021

Berdasarkan Tabel 6 maka penjelasan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat dimasukkan kedalam persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$AKIP = -1,462 + 0,314 AK + 0,311 TR + 0,892 PI + e$$

Berdasarkan hasil perhitungan dari model persamaan regresi diatas, dapat diinterpretasikan sebagai berikut: (1) Nilai konstanta (α) sebesar -1,462, mendindikasikan bahwa apabila variabel independen yaitu akuntabilitas (AK), transparansi (TR), dan pengendalian internal (PI) adalah 0 (nol) maka kinerja pemerintah pada SKPD yaitu sebesar konstanta -1,462 (2) Koefisien regresi variabel akuntabilitas (AK) memiliki nilai sebesar 0,314 mengindikasikan bahwa setiap nilai akuntabilitas mengalami kenaikan maka kinerja pemerintah SKPD juga akan meningkat sebesar 0,314 satuan dengan asumsi variabel lain konstan. (3) Koefisien regresi variabel transparansi (TR) memiliki nilai sebesar 0,311 mengindikasikan bahwa setiap nilai transparansi mengalami kenaikan maka kinerja pemerintah SKPD juga akan meningkat sebesar 0,311 satuan dengan asumsi variabel lain konstan. (4) Koefisien regresi variabel pengendalian internal (PI) memiliki nilai sebesar 0,892 mengindikasikan bahwa setiap nilai pengendalian internal mengalami kenaikan maka kinerja pemerintah SKPD juga akan meningkat sebesar 0,892 satuan dengan asumsi variabel lain konstan.

Uji Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 7
Hasil Uji Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,858 ^a	,737	,729	,42261

a. Predictors: (Constant), AK, TR, PI

b. Dependent Variable: KP

Sumber: Data primer yang diolah, tahun 2021

Berdasarkan Tabel 7 dapat diketahui bahwa besarnya koefisien determinasi yang menunjukkan nilai R-square pada penelitian ini sebesar 0,737 yang berarti bahwa kontribusi variabel kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, kualitas sumber daya manusia, dan sistem pelaporan menjelaskan variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yaitu sebesar 73,7 %, sedangkan sisanya 26,3 % dipengaruhi oleh faktor atau variabel lain diluar penelitian ini.

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Tabel 8
Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	48,008	3	16,003	89,602	,000 ^b
1 Residual	17,145	96	0,179		
Total	65,153	99			

a. Dependent Variable: KP

b. Predictors: (Constant), PI, TR, AK

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 8 maka dapat diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 89,602 dengan tingkat signifikansi 0,000. Karena nilai signifikansi jauh lebih kecil dari 0,05 ($\alpha=5\%$), maka hasil dari model regresi menunjukkan bahwa ada pengaruh variabel akuntabilitas, transparansi, dan pengendalian internal terhadap kinerja pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa model ini layak digunakan dalam penelitian.

Uji t

Tabel 9
Hasil Uji t

Model	Coefficients ^a				Keterangan
	T	Sig	A		
(Constant)	-4,051	,000			
AK	3,205	,002	0,05		Signifikan
1 TR	3,149	,002	0,05		signifikan
PI	11,810	,000	0,05		Signifikan

a. Dependent Variable: KP

Sumber: Data primer yang diolah, tahun 2021

Berdasarkan Tabel 9 menunjukkan hasil pengujian hipotesis sebagai berikut: (a) pengujian hipotesis akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah dengan menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,002 yang berarti kurang dari 0,05 ($\alpha=5\%$), maka dapat disimpulkan bahwa H₁ diterima, (b) pengujian hipotesis transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah dengan menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,002 yang berarti kurang dari 0,05 ($\alpha=5\%$), maka dapat disimpulkan bahwa H₂ diterima, (c) pengujian hipotesis pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah dengan menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti kurang dari 0,05 ($\alpha=5\%$), maka dapat disimpulkan bahwa H₃ diterima.

Pembahasan

Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja s_xr_f Pemerintah

Berdasarkan hasil *output* data SPSS 25, dalam pengujian yang telah dilakukan pada hasil uji regresi linier berganda variabel akuntabilitas menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif terhadap kinerja pemerintah pada SKPD Kota Surabaya. Dapat dibuktikan dengan koefisien akuntabilitas pada persamaan regresi linier berganda sebesar 0,314. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya akuntabilitas dapat mempengaruhi peningkatan kinerja pemerintah. Berdasarkan hasil uji regresi kejelasan sasaran anggaran memiliki nilai positif sebesar 0,333 dan

Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Auditya (2013), Damayanti (2017), Wiguna *et al.*, (2015) dengan hasil menunjukkan bahwa

akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pemerintah. Dengan menjalankan asas akuntabilitas sebagai kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan (*disclosure*) segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut maka kualitas kinerja pemerintah daerah baik dari sisi financial dapat meningkat dan menjadi lebih baik guna mendorong terwujudnya *good governance*.

Pengaruh Transparansi terhadap Kinerja Pemerintah

Berdasarkan hasil output data SPSS 25, dalam pengujian yang telah dilakukan pada hasil uji regresi linier berganda variabel transparansi menyatakan bahwa adanya pengaruh positif terhadap kinerja pemerintah pada SKPD Kota Surabaya. Dapat dibuktikan dengan koefisien transparansi pada persamaan regresi linier berganda bernilai sebesar 0,311. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya transparansi dapat mempengaruhi peningkatan kinerja pemerintah. Hal ini berarti bahwa semakin transparan pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan dalam SKPD Pemerintah Kota Surabaya maka akan semakin meningkatkan kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan.

Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Auditya (2013), Saputra *et al.*, (2014), Wiguna *et al.*, (2015) dengan hasil menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Semakin mudah masyarakat dalam memperoleh informasi tentang program penyelenggaraan pemerintah, maka praktik penyelenggaraan pemerintah tersebut dapat dinilai memiliki transparansi yang tinggi.

Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Kinerja Pemerintah

Berdasarkan hasil output data SPSS 25, dalam pengujian yang telah dilakukan pada hasil uji regresi linier berganda variabel pengendalian internal menyatakan bahwa adanya pengaruh positif terhadap kinerja pemerintah pada SKPD Kota Surabaya. Dapat dibuktikan dengan koefisien transparansi pada persamaan regresi linier berganda bernilai sebesar 0,892. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya pengendalian internal dapat mempengaruhi peningkatan kinerja pemerintah.

Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Karim (2019) dan Damayanti (2017) yang menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah. Pengendalian internal dilakukan untuk memantau apakah kegiatan operasional maupun financial organisasi telah berjalan sesuai dengan prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan pengendalian internal terhadap kinerja pemerintah pada SKPD Kota Surabaya. Pengumpulan data pada penelitian ini dengan membagikan kuesioner kepada setiap SKPD Kota Surabaya dan pemilihan sampel menggunakan purposive sampling. Berikut adalah kesimpulan dari hasil penelitian: (1) Variabel akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Surabaya. Hal ini menjelaskan bahwa pemerintah telah melaksanakan visi, misi, serta rencana strategis atau tujuan dari instansi tersebut yang telah ditetapkan. Apabila semakin baik bentuk pertanggungjawaban pemerintah SKPD Kota Surabaya, maka kinerja SKPD akan meningkat. (2) Variabel transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Surabaya. Hal ini berarti pemerintah telah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai rencana kerja apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah, serta mengapa suatu program atau kebijakan dilakukan dan

bagaimana organisasi tersebut dapat dapat menjalankan operasionalnya. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin baik bentuk keterbukaan pemerintah SKPD Kota Surabaya, maka kinerja SKPD akan meningkat. (3) Variabel pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Surabaya. Hal tersebut berarti semakin baik sistem pengendalian internal yang diterapkan secara efektif dan efisien maka akan berdampak positif juga terhadap kinerja pemerintah SKPD.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi penelitian berikutnya. Keterbatasan penelitian ini antara lain: (1) Penelitian ini hanya menggunakan data kuesioner sebagai instrumen penelitian, sehingga kemungkinan respon jawaban yang bias karena persepsi responden yang disampaikan belum tentu mencerminkan keadaan yang sebenarnya (subjektif), (2) Dalam pengisian kuesioner peneliti tidak dapat mendampingi responden, kuesioner hanya dititipkan karena kesibukan instansi terkait. Sehingga hasil jawaban yang diharapkan kurang maksimal, (3) Dalam penelitian ini ruang lingkup dibatasi hanya pada Dinas, Badan, dan Inspektorat tidak termasuk kecamatan. Hasil penelitian dapat memberikan perbedaan jika menambahkan jumlah pada obyek penelitian.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan dari simpulan yang diperoleh, dapat dikembangkan dengan beberapa saran bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini. Berikut adalah saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini: Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan lingkup penelitian dengan menambahkan jumlah obyek yang lebih banyak seperti menambahkan lingkup pada kecamatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aristanti. 2011. *Hukum Pajak dan Perpajakan dengan Pendekatan Mind Map*. CV Alfabeta. Bandung.
- Auditya, L. 2013. Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Fairness* (3).
- Damayanti. 2017. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. *Skripsi*.
- Dessler, G. 2009. *Manajemen SDM*. Indeks. Jakarta.
- Ghozali, I. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS 19*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- _____. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- _____. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Gujarati. 2008. *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Erlangga. Jakarta.
- Indriasari. 2008. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Illir).
- Jensen dan Meckling. 1997. *The Theory of The Firm: Manajerial Behaviour, Agency Cost, and Ownership Sructure, Journal of Pnancial and Economics*.
- Jitmau. 2017. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Fungsi Pemeriksaan Intern terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris di Kabupaten Sorong).
- Karim, R., dan Mursalim. 2019. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kinerja Keuangan. *Jurnal Ilmu Ekonomi*.

- Krina, P. 2003. Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi.
- Kurniawan, M. 2013. Pengaruh Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi, dan Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Organisasi Publik (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci). *Skripsi*.
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 2003.
- Mahsun. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.
- MenPAN. 2007.
- Pamungkas, B. 2012. Pengaruh Penerapan Akuntansi sektor Publik dan Pengawasan terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Implikasinya terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ilmiah Ranggagading*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Riswanto, N. 2016. Analisis Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember.
- Roscoe. 1975. *Fundamental research statistic for the behavioural sciences*. Holt Rinehart & Winston. New York.
- Saputra, D., Darwanis, dan Abdullah, S. 2014. Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Pada Pemda Kabupaten Aceh Selatan), 2(3), *Jurnal Akuntansi*.
- Sawyer. 2009. *Internal Auditing*. Salemba Empat. Jakarta.
- Sekaran, U. 2006. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Salemba Empat. Jakarta.
- Sihaloho dan Halim. 2005. Pengaruh Faktor-Faktor Rasional, Politik, dan Kultur Organisasi terhadap Pemanfaatan Informasi Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.
- Sopannah dan Isa. 2010. Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisiupasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). *Jurnal Akuntansi Pemerintahan* 2(1).
- Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian*. Alfabeta. Bandung.
- _____. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Alfabeta. Bandung.
- _____. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta. Bandung.
- Sumarno. 2003. *Analisis Kualitas Pelayanan Jasa Terhadap Kepuasan dan Loyalitas Pasien Rawat Inap Di Rumah Sakit ST. Elisabeth Semarang*. STMIK. Semarang.
- Wiguna, M., Yuniartha, G., dan Darmawan, N. 2015. Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng. *e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan* (3).